

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara didukung dengan berkembangnya dunia bisnis. Saat perusahaan ingin mempertahankan dan mengembangkan usahanya, maka dibutuhkan sumber pendanaan yang cukup untuk mendanai setiap kegiatan operasionalnya. Beberapa sumber pendanaan yang digunakan dalam perusahaan yaitu sumber internal (*internal source*) dan sumber eksternal (*external sources*). *Internal source* adalah modal atau dana yang dibentuk dan dihasilkan sendiri dalam perusahaan, seperti laba ditahan. *External sources* adalah modal yang berasal dari luar pihak perusahaan, seperti bank, kreditur, asuransi dan pemilik saham. Sumber yang berasal dari eksternal biasanya dilakukan dengan menerbitkan surat utang yang nantinya akan dibeli oleh kreditur. Ketika perusahaan yang menggunakan modal dari hutang maka perusahaan harus memberikan pengembalian berupa bunga yang diberikan kepada kreditur yang akan menjadi *cost of debt* (biaya utang) bagi perusahaan.

Suatu perusahaan membutuhkan pendanaan untuk mengelolah atau memenuhi kebutuhan operasi dan mendukung ekspansi bisnis perusahaan seperti mendirikan fasilitas produksi baru atau mengakuisisi perusahaan lain yang membutuhkan pendanaan yang lebih besar. Penggunaan utang dalam bentuk investasi sebagai tambahan untuk mendanai aset perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan maka laba yang tersedia dapat digunakan untuk pengembalian berupa bunga beserta pinjaman.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba adalah kinerja manajemen dalam mengelola keuangan dan pinjaman perusahaan dikarenakan jika pihak manajemen kurang berhati-hati dalam mengolah pinjamannya maka bisa menjadi masalah bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Pada perusahaan yang sudah *go public*, faktor produksi pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana untuk operasional perusahaan, maka manajemen harus dapat menyediakan dana secara tepat dan cermat, tidak kurang dan tidak lebih, dikarenakan perusahaan yang mengalami kekurangan modal akan mengalami kesulitan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, sebaliknya perusahaan yang memiliki modal berlebih akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena menanggung beban bunga, sehingga semakin besar proporsi hutang dalam struktur modal, maka semakin besar laba yang akan digunakan untuk membayar bunga dan semakin besar pula resiko kelangsungan operasi perusahaan.

“Menurut Kementerian Perindustrian menyatakan industri manufaktur masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan terdapat tujuh sektor unggulan manufaktur, yaitu makanan & minuman, logam dasar, alat angkut, mesin dan perlengkapan kimia, farmasi, serta elektronik. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian kinerjanya selama ini tercatat konsisten terus positif, mulai dari perannya terhadap peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja” (Sumber: [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)).

Berdasarkan data Statistik Tahunan dari BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), berikut perbandingan antara utang dan modal perusahaan dari tahun 2019-2021:

**Tabel 1.1 Perbandingan Utang dan Modal Perusahaan**

Sektor / Sub Sektor	<i>DER Ratio</i>		
	2019	2020	2021
<b>Industri Barang Konsumsi</b>	4,89	5,31	4,6
Subsektor Makanan & Minuman	1,19	0,96	1,16
Subsektor Rokok	0,56	0,58	0,62
Subsektor Farmasi	0,82	0,90	1,12
Subsektor Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga	0,91	1,10	0,92

Subsektor Peralatan Rumah Tangga	0,85	1,01	0,78
----------------------------------	------	------	------

Pada Tabel 1.1, nilai *DER Ratio* menunjukkan perbandingan antara utang dan modal perusahaan, jika nilai *DER* lebih dari 1 atau semakin meningkat menandakan penggunaan utang atas kegiatan operasional perusahaan lebih besar dari pada modal yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2019 sub sektor makanan & minuman memiliki nilai *DER* sebesar 1,19, menandakan bahwa penggunaan utang lebih besar dari pada modal perusahaan, namun pada tahun 2020 nilai *DER* mengalami penurunan sebesar 19,32% menjadi 0,96 dan tahun 2021, nilai *DER* meningkat sebesar 21% menjadi 1,16. Hal ini menunjukkan sub sektor makanan & minuman lebih memilih pendanaan perusahaan melalui utang untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, dapat dilihat nilai *DER* proporsi nilai hutang lebih besar dibandingkan dengan subsektor perusahaan lainnya.

Salah satu perusahaan yang membutuhkan suatu pendanaan untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan operasional adalah perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman, seperti yang dialami PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO), “Pada akhir September 2019, PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mengalami peningkatan total liabilitas karena adanya kenaikan utang usaha 29,66%, kenaikan pinjaman bank sebesar 608,33%, dan kenaikan utang pembiayaan lembaga keuangan dan utang lain-lain sebesar 79,24%. Kenaikan liabilitas ini untuk menunjang kegiatan investasi dan penambahan modal kerja perusahaan”, ungkap Lukas Setio Wongso Wong, Direktur

Keuangan Sariguna Primatirta dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. CLEO melakukan peningkatan liabilitas untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan, mesin, dan kendaraan” (Sumber: [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id)). Namun dengan adanya peningkatan liabilitas, “CLEO mencatat kenaikan pendapatan hingga 30,64% menjadi Rp775,69 miliar pada periode Januari-September 2019 dan adanya lonjakan pendapatan, laba bersih CLEO meningkat pesat dengan mengantongi laba bersih Rp94,02 miliar pada akhir September 2019, naik dua kali lipat ketimbang periode yang sama tahun lalu.” (Sumber: [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id)).

Pada akhir 31 Desember 2019, PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) menerbitkan penjelasan adanya kenaikan aset dan hutang melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), “dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dimana Pasal III.4 menjelaskan bahwa perusahaan tercatat wajib memberikan penjelasan tertulis kepada PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan perubahan lebih dari 20% (dua puluh persen) total aktiva dan/atau total kewajiban, jika ada, pada laporan keuangan” (Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Berikut persentase kenaikan total aset dan total liabilitas:

Deskripsi	Rekapitulasi Laporan Posisi Keuangan Tanggal 31 Desember 2019		
	( Dalam Rupiah Penuh )		
	31 Desember 2019 ( Diaudit )	31 Desember 2018 ( Diaudit )	%
Total Aset	1.245.144.303.719	833.933.861.594	49,31%
Total Liabilitas	478.844.867.693	198.455.391.702	141,29%

**Gambar 1.1 Persentase Kenaikan Total Aset dan Liabilitas**

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

“CLEO mengalami adanya kenaikan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp280.389.475.991 atau sebesar 141,29% dikarenakan adanya kenaikan hutang usaha sebesar Rp232.758.846.112 atau 742,08%, kenaikan hutang pajak sebesar Rp7.486.652.020 atau 77,32%, kenaikan hutang pajak tangguhan sebesar Rp4.281.276.393, kenaikan hutang estimasi imbalan kerja karyawan Rp5.681.865.061 atau 45,05%, kenaikan hutang pembelian aset tetap sebesar Rp8.528.239.944 atau 666,25%, kenaikan hutang sewa pembiayaan sebesar Rp8.103.496.068 atau 164,32% dan kenaikan hutang lain lain sebesar Rp9.253.000.058 atau 39,57% serta kenaikan hutang jaminan pelanggan sebesar Rp1.131.929.270 atau 3,36%. Kenaikan liabilitas ini untuk menunjang kegiatan investasi dan penambahan modal kerja Perseroan” (Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

“CLEO mencatatkan laba bersih sebesar Rp130,75 miliar atau naik 106,34% dibanding periode yang sama tahun 2018, yang mencatat laba bersih tahun berjalan

sebesar Rp63,26 miliar dan total pendapatan sepanjang tahun 2019 sebesar Rp1,088 triliun atau naik 30,92% dibanding periode yang sama tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp831,1 miliar” (Sumber: pasardana.id). Maka dengan adanya peningkatan laba bersih dan pendapatan, CLEO dinilai mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur untuk melunasi pokok utang beserta bunganya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan yang melakukan pinjaman kepada kreditur, maka perusahaan tersebut harus dapat berkembang sehingga mampu untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang dan biaya bunga yang timbul. Tetapi, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka perusahaan tersebut dinyatakan pailit atau bangkrut. “Salah satu penyebab krisis keuangan dan kebangkrutan ini disebabkan oleh utang (*debt*). Menumpuknya utang dan ketidakmampuan dalam membayar pinjaman tersebut kepada kreditur menjadi penyebab krisis keuangan dan kebangkrutan yang dialami oleh banyak perusahaan” (Awaloedin dan Nugroho, 2019).

“Di Indonesia, kasus kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sepanjang 2018 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang menjadi salah satu indikator, ekonomi nasional terganggu. Dari penelusuran Kontan.co.id, “pada lima pengadilan niaga di Indonesia ada 411 perkara, dengan 297 perkara PKPU, dan 194 perkara pailit pada tahun 2018. Sementara pada tahun 2017 tercatat ada 353 perkara dimana 238 merupakan perkara PKPU, dan 115 perkara pailit.” Menurut James Purba sebagai Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mengatakan “Banyak permohonan PKPU maupun pailit yang diajukan oleh

kreditur, bukan dari debitur yang mengajukan restrukturisasi secara sukarela. Artinya memang semakin banyak perusahaan kesulitan keuangan dan makin meningkatnya jumlah perkara kepailitan menunjukkan bahwa pelaku usaha makin sadar untuk menggunakan jalur hukum dalam merestrukturisasi utang-utang debiturnya.” (Sumber: nasional.kontan.co.id).

Kasus perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang mengalami pailit akibat tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, seperti yang dialami oleh “PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) dengan perincian kewajiban senilai Rp1,5 triliun yang berasal dari 5 kreditur separatis (dengan jaminan) senilai Rp719,03 miliar, 59 kreditur konkuren (tanpa jaminan) Rp334,18 miliar, dan kreditur preferen (prioritas) senilai Rp1,21 miliar dan anak usaha Sari Wangi Group yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung juga mengalami pailit dengan jumlah hutang mencapai Rp25.71 miliar yang berasal dari 5 kreditur separatis senilai Rp31.50 miliar, 19 kreditur konkuren senilai Rp3.28 miliar dan kreditur preferen sebesar Rp922.81 juta. Apalagi, kata James, dengan terbatasnya aktivitas dunia usaha, tentu sangat mempengaruhi pendapatan. Padahal pendapatan ini adalah sumber yang digunakan untuk mencicil hutang, baik utang ke bank maupun ke mitra bisnis.

Sejak tahun 2015 Agricultural Estate Agency dan PT. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung mengalami adanya kesulitan keuangan, perusahaan ini terjerat hutang hingga Rp1,5 triliun ke sejumlah kreditur. Salah satu penyebab kedua perusahaan ini pailit yaitu mengalami kesulitan keuangan karena gagalnya investasi



untuk meningkatkan produksi perkebunan perusahaan. Perusahaan ini mengembangkan sistem drainase atau penyiraman air dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun, hasil yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan maka menyebabkan pembayaran cicilan utang tersendat, dan membuat sejumlah kreditur mengajukan tagihan. Ada lima bank yang saat itu mengajukan tagihan yaitu PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Panin Indonesia Tbk, dan PT Bank Commonwealth. Dengan adanya permasalahan ini, perusahaan Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorub langsung mengajukan permohonan perdamaian untuk penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada para kreditur” (Sumber: ekonomi.kompas.com).

“Mengurai sengketa utang piutang Sariwangi dan Indorub harus dimulai ketika proses PKPU keduanya berakhir pada 9 Oktober 2017. Sariwangi mempunyai tagihan senilai Rp 1,05 triliun, sementara Indorub punya tagihan senilai Rp 35,71 miliar. Mengutip salinan putusan, restrukturisasi utang pokok Sariwangi dan Indorub baru akan dibayar setelah waktu tenggang (*grace period*) enam tahun pascahomologasi. Sementara utang bunga akan langsung dibayar perbulan selama delapan tahun pascahomologasi. Dengan perincian sebesar 4,75 persen akan dibayarkan pada tahun pertama, dan kedua 5,5 persen akan dibayar pada tahun ketiga, dan keempat. 6,5 persen akan dibayar pada tahun kelima, dan keenam. Dan 7,5 persen akan dibayar pada tahun ketujuh dan kedelapan. Kewajiban 416.000 dollar AS yang dimiliki Sariwangi, dan 42.000 dollar AS milik Indorub kepada ICBC yang sebenarnya hanya

utang bunga pada tahun pertama. Tagihan bunga ini yang harusnya dicicil tiap bulan kemudian ditangguhkan selama setahun pascahomologasi, sehingga harus dibayarkan pada 9 Oktober 2016. Hingga pada 24 Oktober 2017, setelah ditambahkan bunga total nilai tagihan yang dipegang ICBC kepada Sariwangi senilai Rp 288,932 miliar dan kepada Indorub senilai Rp 33,827 miliar” (Sumber: ekonomi.kompas.com).

“Namun hingga 2018, perusahaan Sariwangi dan Maskapai Perkebunan Indorub tetap tidak bisa menjalankan janjinya. Hingga pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditur, yakni PT Bank ICBC Indonesia terhadap Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Seiring dengan keputusan tersebut, dua perusahaan perkebunan teh ini resmi menyandang status pailit” (Sumber: ekonomi.kompas.com).

“Setelah dinyatakan pailit, PT Sariwangi Agriculture Estate Agency dan anak usahanya, PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung menyatakan sudah memulai membagikan harta pailit perusahaan kepada para kreditur. Namun harta yang dibagikan baru hanya milik Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Salah satu pihak yang mendapatkan harta pailit tersebut yaitu PT Bank ICBC Indonesia. Namun, Sariwangi belum dapat membagikan harta pailit kepada kreditur dikarenakan harta perusahaan masih berbentuk aset fisik” (Sumber: cnnindonesia.com).

Dari kasus PT Sariwangi dapat dilihat bahwa biaya utang yang ditanggung tinggi sebesar Rp1,5 triliun, akibat biaya utang yang tinggi mengakibatkan beban bunga yang ditanggung tinggi sebesar 416.000 dollar AS, sehingga PT Sariwangi tidak mampu membayar beban bunga yang besar atas kewajiban perusahaan yang besar dan terdapat adanya permasalahan utang piutang terhadap beberapa kreditur yang berakibat PT Sariwangi dinyatakan pailit oleh majelis hakim pengadilan Jakarta Pusat serta manajer tidak mampu mengontrol atau mengelolah perusahaan dengan baik sehingga perusahaan tidak dapat untuk memenuhi kewajibannya yang berdampak pada terjadinya kepailitan terhadap perusahaan dan adanya pemindahan kepemilikan atas aset kepada kreditur. Oleh karena itu, dengan adanya dampak yang ditimbulkan terhadap perusahaan maka biaya utang menjadi penting untuk diteliti dan menjadikan perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebagai objek dalam penelitian ini.

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal dari kreditur dalam bentuk utang. *Return* bagi kreditur ialah bunga yang dianggap perusahaan sebagai biaya hutang. “Bagi perusahaan yang berutang, bunga merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditur sampai utang tersebut dapat dilunasi. Tingkat pengembalian inilah yang akan menjadi *Cost of Debt* bagi perusahaan” (Marcelliana, 2014 dalam Manullang *et al*, 2020). “Menurut IAS No 23 dalam Mulyana & Daito (2021), biaya utang terdiri atas (1) Bunga pada bank *overdraft* dan bunga atas utang jangka panjang dan utang jangka pendek, (2) Amortisasi diskon atau premium atas pinjaman, (3)

Amortisasi atas biaya tambahan yang timbul dalam perencanaan pinjaman, (4) Biaya yang timbul atas pengakuan sewa guna usaha, (5) Perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing berkenaan dengan biaya utang.”

“Utang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan surat pengakuan utang (obligasi), biaya utang yang berasal dari pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan” (Awaloedin & Nugroho, 2019). Perusahaan yang memutuskan untuk berutang kepada kreditur maka perusahaan memiliki kewajiban kepada kreditur atas utang pokok beserta beban bunga yang telah diberikan. Sehingga ketika beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan meningkat maka menunjukkan bahwa biaya utang perusahaan juga akan semakin meningkat atas penggunaan utang perusahaan yang berdampak pada ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan semakin rendah laba perusahaan yang tercatat dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kepailitan. Berbeda dengan beban bunga yang rendah menunjukkan bahwa biaya utang digunakan perusahaan juga semakin rendah yang menggambarkan bahwa perusahaan dapat mampu memenuhi dan mengelola kewajiban kepada kreditur.

Biaya utang dalam penelitian ini diprosikan dengan *Cost of Debt (COD)*. *COD* digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan dana melalui hutang untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. “Biaya utang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan perusahaan tersebut dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut” (Mulyana &

Daito, 2021). Instrumen utang ini dapat berupa utang bank (*bank loan*) jangka panjang dan jangka pendek, obligasi, sewa guna usaha (*leasing*), dan utang lainnya. Banyak faktor yang memengaruhi biaya utang diantaranya penghindaran pajak, ukuran perusahaan, rasio utang dan umur perusahaan.

Variabel independen pertama yang diduga memiliki pengaruh terhadap biaya utang yaitu penghindaran pajak. Menurut PPh 25/29 Badan, “Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang melakukan pembayaran dan penyetoran perpajakan.” “Namun perusahaan menganggap pajak adalah beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba perusahaan atau laba setelah pajak perusahaan. Untuk dapat menjaga stabilitas laba yang diharapkan maka biasanya perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat berupa penyeludupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*)” (Utama, Kirana dan Sitanggang 2019).

“Penghindaran pajak atau dikenal dengan *tax avoidance* adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengecilkan pajak dalam undang-undang pajak melalui perencanaan pajak” (Dewi dan Lely 2016 dalam Dewi dan Ardiyanto 2020). Menurut Jacob (2013) dalam Darussalam (2009) dalam Dewi dan Ardiyanto (2020) berpendapat “penghindaran pajak sebagai upaya untuk pengurangan beban pajak dengan hati-hati menggunakan manfaat celah-celah regulasi terkait, sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion*

adalah upaya yang dilakukan dengan memperkecil pajak terhutang dengan melanggar ketentuan perpajakan.”

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya lengkap dan jelas. *Tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan yang tidak melanggar hukum dan dapat memanfaatkan *deductible expense* yaitu memanfaatkan biaya utang. “Beban bunga *deductible expense* yaitu diatur dalam PMK No. 169/PMK.010/2015. Peraturan ini mengatur biaya utang dapat diakui sebagai beban untuk penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya antara utang dan modal paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1)” (Wardani dan Ruslim 2020).

“Beban bunga yang dibayarkan perusahaan akan dicatat oleh perusahaan dalam laporan laba rugi sebagai beban atau biaya utang yang akan mengurangi besarnya pajak terutang dengan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan meningkatkan biaya utang agar pajak perusahaan semakin kecil, namun pemegang saham memandang kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai tindakan yang mengandung risiko sehingga pemegang saham tidak memerlukan investasi tambahan dari utang yang dapat menambah biaya utang perusahaan” (Trisnawati & Nasser, 2016 dalam Wardani & Ruslim, 2020).

Perusahaan merasa terbebani dengan adanya pajak yang tinggi sehingga perusahaan melakukan adanya tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga serta menambahkan hutang perusahaan agar terlihat meningkat. Dari sisi pajak, utang merupakan instrument yang menguntungkan dikarenakan Perusahaan dapat membebaskan biaya bunga. Dalam penelitian ini “*Tax Avoidance* diukur menggunakan *Current Effective Tax Rate (ETR)* yaitu beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak” (Pratama *et al*, 2017).

Salah satu alternatif perusahaan menggunakan pendanaan dari utang yaitu memberikan keuntungan berupa *tax saving* yang disebabkan bunga pinjaman bersifat *tax deductible* yang akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Nilai *Current ETR* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan telah baik dalam melakukan perencanaan pajaknya, dengan meningkatkan beban yang menyebabkan menurunnya laba sehingga pembayaran pajak akan berkurang. Sehingga ketika *Current ETR* rendah maka penghindaran pajak akan tinggi dan laba sebelum pajak akan menurun. Kreditur memandang perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sebagai tindakan yang mengandung risiko perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang tinggi sehingga kreditur cenderung memberikan beban bunga yang lebih besar dan meningkatkan besarnya biaya utang. Oleh karena itu, semakin tingginya tindakan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka biaya utang perusahaan juga semakin tinggi. Hasil penelitian Wardani dan Ruslim (2020) membuktikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*). Namun berdasarkan penelitian Manullang *et al* (2020) dan Wardani dan Rumahorbo (2018) membuktikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

Selain Penghindaran Pajak, variabel independen kedua yang diduga memiliki pengaruh terhadap biaya utang adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi *Cost of Debt* dalam penelitian ini. “Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala yang digunakan untuk menggolongkan perusahaan menjadi perusahaan besar, menengah, atau kecil, yang dilihat dari total aktiva perusahaan” (Widaryanti, 2009 dalam Suryani, Imelda dan Wirianata, 2019). Menurut Bambang Riyanto (2001:299) dalam Awaloedin dan Nugroho (2019) “Ukuran perusahaan merupakan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva.”

Perusahaan memiliki kebutuhan dana yang besar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan dana yang tersedia adalah dengan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal dapat diperoleh dengan penerbitan saham, obligasi, maupun utang sehingga dalam rangka pemenuhan pendanaan eksternal tersebut perusahaan akan mampu lebih meningkatkan kinerja operasionalnya dalam menjalankan perusahaan. Saat memberikan pinjaman dana, kreditur juga mempertimbangkan dan memperhatikan ukuran perusahaan karena



risiko yang dimiliki perusahaan yang lebih besar cenderung dinilai rendah dan dianggap menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat dipercaya.

Dalam mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal, ukuran perusahaan yang besar dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dibandingkan ukuran perusahaan yang kecil karena tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut tinggi yang berdampak perusahaan akan menggunakan jumlah pinjaman yang besar, maka kreditur menilai perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya di periode mendatang. Perusahaan yang lebih besar juga cenderung memiliki tingkat *leverage* yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan biaya utang karena risiko *default* menjadi meningkat. Kreditur umumnya lebih mempercayai perusahaan yang total asetnya lebih besar karena perusahaan tersebut dinilai lebih transparan dalam hal informasi dibandingkan perusahaan kecil. Semakin tinggi biaya utang suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan gagal dalam melakukan pembayaran utang, hal tersebut dinilai berisiko oleh kreditur sehingga kreditur akan membebani beban bunga yang lebih tinggi. Sehingga semakin besarnya ukuran perusahaan maka kebutuhan akan modal semakin tinggi yang berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat hutang perusahaan dan akan meningkatkan biaya utang perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi juga tingkat *cost of debt* yang ditanggung perusahaan.

Hasil penelitian Wardani & Ruslim (2020) membuktikan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang, Vhika Meiriasari

(2017) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang, sedangkan Awaloedin & Nugroho (2019) membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang.

Variabel independen ketiga yang mempengaruhi biaya utang adalah rasio utang atau dapat disebut *leverage*. Menurut Brigham dan Houston (2010) dalam Awaloedin dan Nugroho (2019) “Rasio *leverage* juga dapat didefinisikan sebagai rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*).” “*Leverage* berhubungan positif dengan biaya utang” (Lim, 2011 dalam Awaloedin dan Nugroho 2019). Perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi dapat disimpulkan sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan tersebut merupakan utang. Penggunaan utang yang tinggi mengakibatkan risiko yang dimiliki perusahaan akan semakin besar karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar utang. Menurut Sawir (2000) dalam Awaloedin dan Nugroho (2019) menjelaskan bahwa “Rasio *leverage* mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio Utang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban finansialnya seandainya perusahaan pada saat itu mengalami likuidasi atau mengalami kesulitan keuangan dalam perusahaan.” Dengan demikian *solvabilitas* berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu agar tidak terlambat.

“Rasio utang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu membandingkan antara total kewajiban dan total ekuitas yang dimiliki perusahaan di

akhir tahun” (Awaloedin dan Nugroho 2019). Nilai *DER* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan berupa utang dibandingkan ekuitas yang dimiliki. Semakin meningkat nilai utang atau pinjaman yang dimiliki perusahaan maka akan menunjukkan bahwa perusahaan lebih membiayai kegiatan operasional perusahaan menggunakan utang dibandingkan menggunakan ekuitas perusahaan yang menandakan bahwa beban keuangan yang ditanggung oleh perusahaan tinggi yang menyebabkan perusahaan memiliki pertumbuhan laba yang menurun dan arus kas jangka panjang yang lebih rendah. Hal ini akan dinilai berisiko oleh kreditur sehingga kreditur menetapkan beban bunga yang besar dan menyebabkan biaya utang perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio utang dalam perusahaan maka akan semakin besar biaya utang perusahaan. Hasil penelitian Awaloedin dan Nugroho (2019) membuktikan rasio utang (*leverage*) berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*), Angela Dirman (2020) membuktikan rasio utang (*leverage*) berpengaruh positif terhadap biaya utang (*cost of debt*). Namun, hasil penelitian Septian & Panggabean (2017) membuktikan rasio utang (*leverage*) tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Variabel independen keempat yang diduga berpengaruh terhadap biaya utang adalah umur perusahaan. “Umur perusahaan juga dapat menggambarkan kemampuan bertahan dan pengalaman usaha sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam kondisi normal, perusahaan yang telah lama berdiri mempunyai publikasi

perusahaan yang lebih baik dari pada perusahaan baru” (Awaloedin dan Nugroho, 2019). “Umur perusahaan dapat dihitung berdasarkan tahun pertama kali perusahaan melakukan IPO (*Go Public*)” (Simanjuntak dan Sari, 2014 dalam Awaloedin dan Nugroho, 2019).

Perusahaan yang sudah lama berdiri lebih banyak memiliki pengalaman yang diperoleh sehingga semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang telah diterima masyarakat tentang perusahaan tersebut. Kreditur cenderung menilai perusahaan yang telah lama berdiri memiliki pengalaman usaha dan mampu bertahan dalam segala kondisi ekonomi yang terjadi, sehingga kreditur lebih percaya untuk menanamkan modalnya dikarenakan perusahaan yang telah berdiri lama diasumsikan menghasilkan laba yang tinggi. Semakin besar laba yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi kepercayaan dari kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan karena perusahaan memiliki jaminan aset ketika pinjaman telah jatuh tempo.

Semakin lama umur perusahaan terlihat bahwa perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain dan mampu memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian, serta perusahaan telah memiliki banyak informasi sehingga kreditur percaya untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan karena perusahaan dinilai mampu untuk mengelolah kewajibannya dan memperoleh laba. Namun dengan semakin lama perusahaan telah berdiri maka kebutuhan akan pendanaan kegiatan operasional perusahaan semakin besar yang berdampak pada meningkatnya tingkat

hutang perusahaan dan biaya utang akan semakin tinggi. Oleh karena itu disimpulkan bahwa, semakin lama umur perusahaan maka biaya utang semakin meningkat. Hasil penelitian Awaloedin & Nugroho (2019) membuktikan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang (*cost of debt*). Namun, hasil penelitian Syahwier & Fitriani (2017) membuktikan umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Awaloedin & Nugroho (2019) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu Penghindaran Pajak yang mengacu pada penelitian Manullang *et al* (2020).
2. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2017-2020, sedangkan sebelumnya dilakukan pada tahun 2015-2017.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Rasio Utang dan Umur Perusahaan terhadap Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”**

## 1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biaya Utang.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *logaritma* dari total aset, rasio utang yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*, dan umur perusahaan yang dilihat dari berapa lama perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020.

## 1.3. Rumusan Masalah

“Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* berpengaruh positif terhadap biaya utang (*Cost of Debt*)?
2. Apakah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *logaritma* dari total aset berpengaruh positif terhadap biaya utang (*Cost of Debt*)?

3. Apakah rasio hutang yang diproksikan dengan *DER* berpengaruh positif terhadap biaya utang (*Cost of Debt*)?
4. Apakah umur perusahaan yang dilihat dari berapa lama perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berpengaruh positif terhadap biaya utang (*Cost of Debt*)?”

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

“Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* terhadap biaya utang (*Cost of Debt*).
2. Pengaruh positif ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *logaritma* dari total aset terhadap biaya utang (*Cost of Debt*).
3. Pengaruh positif rasio utang yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* terhadap biaya utang (*Cost of Debt*).
4. Pengaruh positif umur perusahaan yang dilihat dari berapa lama perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap biaya utang (*Cost of Debt*).”

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## 1.5. Manfaat Penelitian

“Dengan mengetahui hubungan di antara variable-variabel yang diteliti, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan terutama perusahaan manufaktur, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya hutang.

2. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penelitian selanjutnya serta dapat melengkapi temuan empiris bidang akuntansi dan keuangan khususnya pada perusahaan go public.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini sebagai sumber dan referensi guna untuk melengkapi studi empiris dalam bidang akuntansi bagi pengembangannya dimasa yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai studi akademis dan pengetahuan mengenai biaya hutang, cara pengukuran dan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi biaya hutang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).”



## 1.6. Sistematika Penulisan

“Secara garis besar, proposal ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari proposal ini menjelaskan secara singkat mengenai isi proposal yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas teori mengenai biaya hutang sebagai variabel dependen, teori variabel-variabel independen yaitu penghindaran pajak, ukuran perusahaan, rasio utang dan umur perusahaan, serta hubungan setiap variable independen dengan variable dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variable, dan model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variable penelitian yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sample secara *purposive sampling*, teknik analisis data yang terdiri

dari statistik deskriptif, uji normalitas yang menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan signifikansi dari *Monte Carlo*, uji asumsi klasik dengan melakukan uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*).

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, metode analisis data yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Di dalam bab ini akan dijelaskan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan uraian atas jawaban dari setiap perumusan masalah. Pada bab ini menjelaskan mengenai keterbatasan di dalam penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.”

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA